

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan di capai biasanya di tentukan dalam bentuk kualitatif misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan maupun kesehatan. Pergantian kepemimpinan di pemerintahan Indonesia sebagian besar banyak memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pemerintahan yang berbentuk sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintah terpusat kemudian diganti dengan pemerintahan yang desentralistik.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan bahwa pemerintah provinsi dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun

pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai otonomi daerah.

Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan provinsi yang lebih baik dengan pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan tersebut merupakan dana publik diartikan bahwa provinsi dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber pendapatan daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisiensi dan efektifitas. Otonomi daerah merupakan *new strategi* untuk keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan serta menghadapi globalisasi sehingga MPR telah memberi ketetapan dengan Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi daerah” Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia”. Merupakan landasan hukum keluarnya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan pengembangan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah provinsi dan daerah untuk lebih efisien dan profesional dan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme tersebut terhadap tanggung jawabnya. Pemerintah provinsi perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal

tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan provinsi) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakat.

Pertanggungjawaban laporan-laporan untuk setiap tindakan tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun juga perlu didukung dengan laporan keuangan secara tertulis. Dengan adanya penyajian laporan keuangan yang merupakan salah satu pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, maka laporan keuangan pemerintah provinsi dan daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi - informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas yang berimbas pada membudayanya korupsi sistemik. Untuk mengikis korupsi salah satu caranya adalah membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar. Ikhtisar laporan keuangan yang terpublikasi dikoran atau situs pemerintah provinsi dan daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika di analisis secara lebih seksama. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu

analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo".

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang dapat di rumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan.
2. Membandingkan bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2009 sampai dengan 2011.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian untuk menganalisa data keuangan serta untuk memperoleh data berupa target dan realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sampai tahun 2011. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Praktisi, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan otonomi provinsi.

2. Bagi Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan maupun wawasan tentang bagaimana ruang lingkup dari pemerintahan khususnya mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah provinsi yang diteliti serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
3. Bagi Peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan bahan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang kinerja keuangan agar lebih dikembangkan.